



**KEBIJAKAN RENCANA
UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**



Dasar Pelaksanaan

Latar Belakang
Pengembangan

Kelebihan Sirup V2

Proses Penyusunan
RUP

DASAR PELAKSANAAN



**Perpres 54
Tahun 2010**

beserta
perubahannya

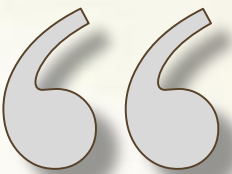
**Inpres 1
Tahun 2015**

**Inpres 1
Tahun 2016**

 **Kembali**

Perpres 54 tahun 2010

Beserta perubahannya



8
Pasal - Ayat 1

Tugas &
Kewenangan PA

10
Pasal - ayat 4

Pelimpahan
Kewenangan

112
Pasal - Ayat 2

Media
Pengumuman

25
Pasal

Waktu RUP



 Kembali
Kebijakan

 Kembali
Dasar
Pelaksanaan

“

- a. PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan RUP.
- b. PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas RUP.

8
Pasal – Ayat 1

← **Kembali
Kebijakan**

← **Kembali
Dasar
Pelaksanaan**

← **Kembali
Perpres**

”

“

10
Pasal – ayat 4

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (seperti pasal 8 ayat (1))

”

← Kembali Kebijakan

← Kembali Dasar Pelaksanaan

← Kembali Perpres

“ (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

- (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
- (1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA.

25
Pasal

← Kembali
Kebijakan

← Kembali
Perpres

← Kembali
Dasar
Pelaksanaan

”

“

112
Pasal - Ayat 2

K/L/D/I wajib menayangkan RUP dan pengumuman Pengadaan di *website* Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

← Kembali Kebijakan
← Kembali Perpres
← Kembali Dasar Pelaksanaan

”

“

2
Instruksi



”

“ Menteri/Pimpinan Lembaga/
Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara/
Kepala Daerah:



Menyelesaikan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran
berikutnya sebelum berakhirnya
Tahun Anggaran berjalan;

”

 Kembali

“



2
Instruksi

SiRUP

”



- b. memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem pembelian secara elektronik (e-Purchasing), lelang cepat melalui sistem informasi kinerja penyedia dan/atau sistem pengadaan barang/jasa yang berlaku;





Versi 1

SiRUP➤

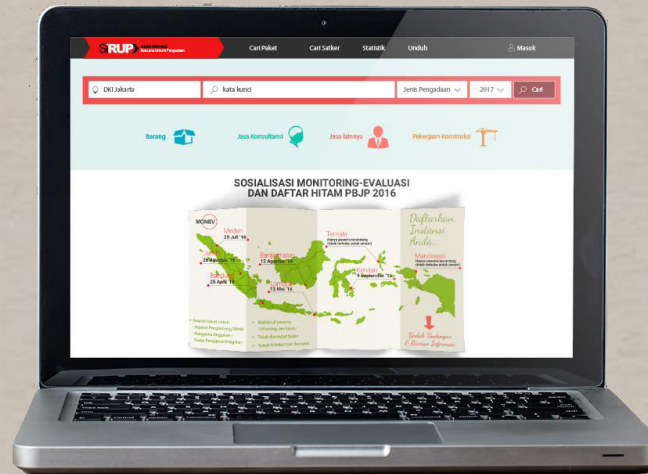
- Admin RUP melakukan Input secara manual
- Belum semua K/L/D/I menginput anggaran pengadaan ke dalam aplikasi sirup dengan akurat
- Banyaknya Permintaan pengembangan dari pengguna Sirup

Interface

Sumber Informasi
Bisnis Prospek
(peluang usaha)
bagi penyedia dan
Masyarakat luas



Menu yang
User-Friendly,
akses lebih cepat
dan mudah



Impor file Anggaran

SRUP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Rekap **RUP** Cari Paket Cari Satker Kelola Data Statistik Unduh asal

Formulir Upload Data RKA

Tahun: 2017

File: no file selected

LKPP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SIRUP LATIHAN RUP TA 2013 MONEV SMART REPORT

HOME REKAP PENCARIAN PAKET PENCARIAN SATKER

LKPP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SRUP Latihan **TEPRA** **INAPROC** **SIKID**

Sirup 2.0 © 2015 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tambah Rencana Umum Pengadaan

Paket Penyedia

Tahun Anggaran: *

Satuan Kerja: PUSKESMAS CIBATU *

Kegiatan: *

Nama Paket Pengadaan: *

Lokasi: *

Jenis Belanja: *

Jenis Pengadaan: *

Volume: *

DANA

Sumber Dana: *

Kode DPA: *

Pagu: *

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Metode Pemilihan Penyedia: *

Awal: *

Akhir: *

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Awal: *

Akhir: *

Deskripsi: *

Inaproc | Monev Online | Smart Report | Portal LKPP

© 2006-2014 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP

- **K/L**
File RKA-K/L dari aplikasi RKAKL
- **Pemerintah Daerah**
File RKA-D dari aplikasi SIKD



User management :

Kewenangan PA/KPA
untuk mengumumkan



Upload file Anggaran

Mempermudah Users & data
lebih akurat

Formulir Pengisian


Mempermudah pengisian

Proses Penyusunan RUP

**Perpres 54 tahun 2010
beserta perubahannya**

22 - 25
Pasal

1 Identifikasi
Kebutuhan

 **Kembali
Kebijakan**

Proses Penyusunan RUP



1 Identifikasi
Kebutuhan


1. PA mengidentifikasi kebutuhan riil instansinya masing-masing;
2. Kebutuhan riil adalah kebutuhan barang/jasa pada tahun $n + 1$ dikurangi ketersediaan barang/jasa;
3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada poin 2 di atas dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD.

Proses Penyusunan RUP

**Perpres 54 tahun 2010
beserta perubahannya**

22 - 25
Pasal




 **Kembali
Kebijakan**

Proses Penyusunan RUP

PA menyusun dan menetapkan rencana anggaran barang/jasa:

- biaya pendukung (biaya pemasangan, biaya transportasi, biaya pelatihan, dll),
- biaya administrasi (biaya pengumuman pengadaan, honorarium, biaya survei lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen pengadaan, dll); dan
- lain-lain sesuai dengan peraturan.

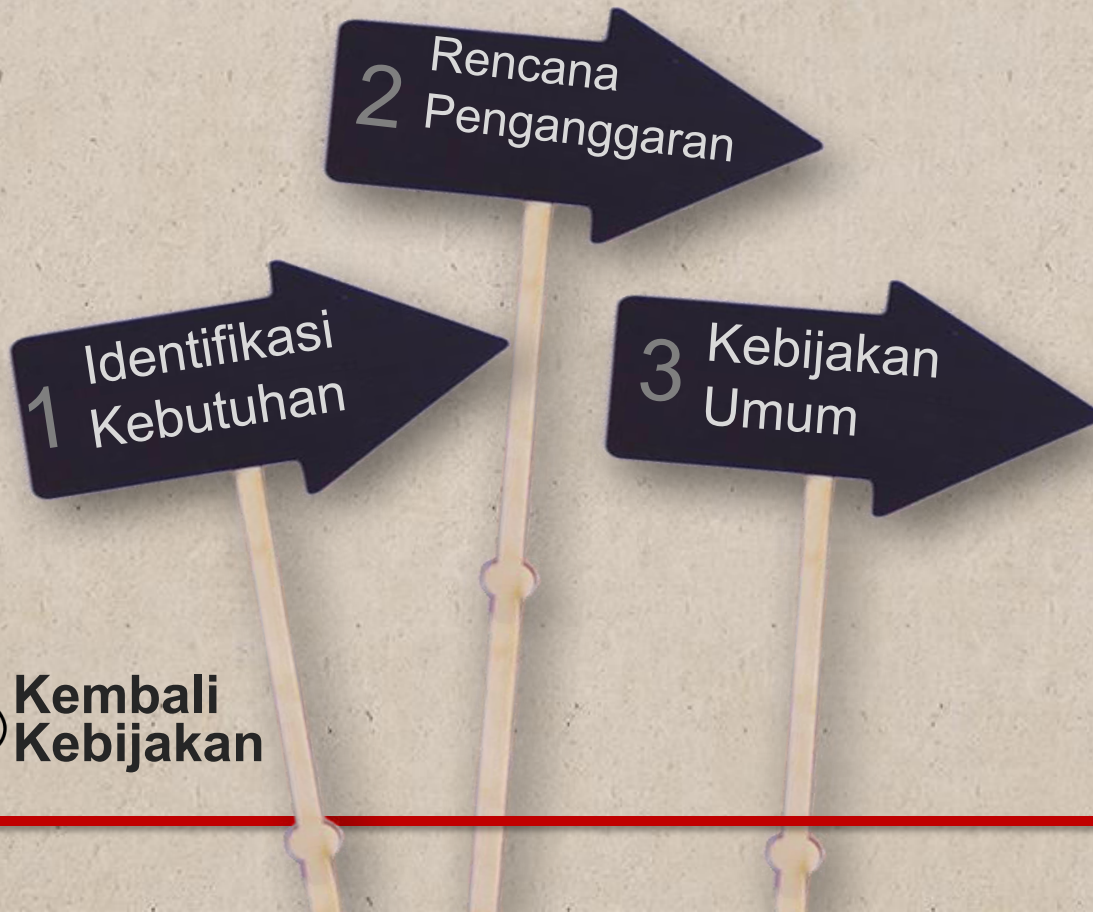



2 Penyusunan & Penetapan Anggaran

Proses Penyusunan RUP

**Perpres 54 tahun 2010
beserta perubahannya**

22 - 25
Pasal

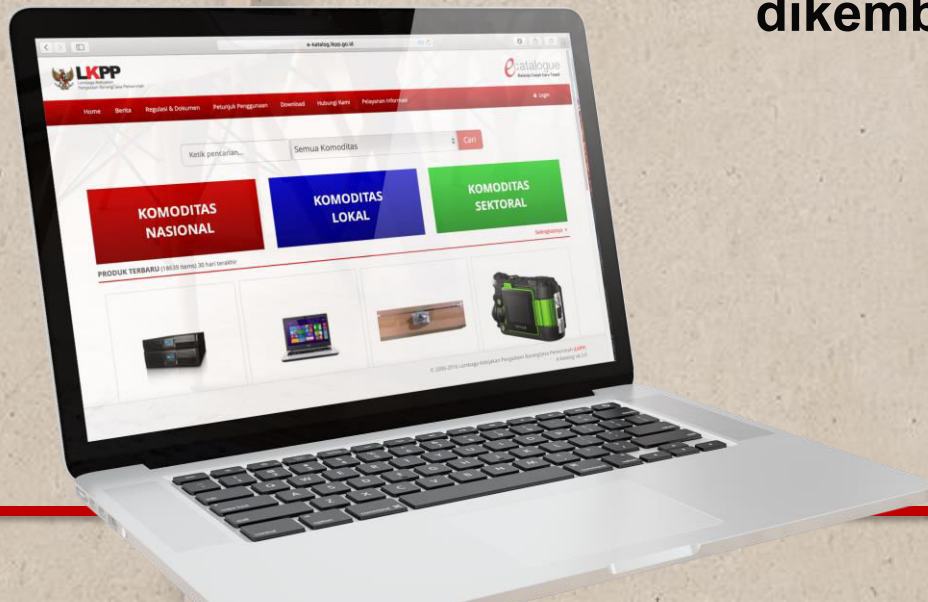


 **Kembali
Kebijakan**

3 Kebijakan Umum

1. Pemaketan Pekerjaan :

- Memaksimalkan penggunaan produksi DN dan memperluas kesempatan usaha bagi Usaha Usaha Kecil serta Koperasi Kecil;
- **Memperhatikan e-Katalog yang dikembangkan oleh LKPP**



3 Kebijakan Umum

1. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :

- Menyatukan/memusatkan kegiatan yg menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di lokasi masing-masing.

Contoh : pembangunan gedung sekolah dasar di wilayah jauh di gunung dengan di pantai. Menghemat biaya, waktu, transportasi, SDM



Proses Penyusunan RUP

- Dilarang Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil

Contoh : Komputer dengan AC



3 Kebijakan Umum

Contoh :
Pengadaan pekerjaan konstruksi di kompleks perkantoran yang terdiri dari beberapa gedung di jadikan 1 paket. Padahal masing masing gedung bisa dilakukan pengusaha kecil.



Proses Penyusunan RUP

- Dilarang Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif

3 Kebijakan Umum

Contoh :

Harus jadi anggota Asosiasi tertentu,
Izin usaha pemda setempat.



Proses Penyusunan RUP

- Dilarang memecah Pengadaan untuk menghindari pelelangan;

Contoh:

Paket pembangunan drainase 350 juta di jadikan 2 paket pekerjaan jadi 200 juta dan 150 juta. Sehingga tidak dilelangkan



3 Kebijakan Umum



2. Tata Cara Pengadaan:

- Melalui swakelola yg merupakan kegiatan yg direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
- Melalui penyedia baik sebagai badan usaha maupun perorangan



LKPP


Kelembagaan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tata Cara Pengadaan

Swakelola

Penyedia dalam swakelola

Penyedia

 Kembali
Kebijakan

Pengertian Swakelola adalah

Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.



Kriteria Swakelola :

1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
2. pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
3. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu;
5. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;



6. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus;
7. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
8. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
10. penelitian dan pengembangan dalam negeri;
11. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.



Swakelola

Pasal **1** No.12

Arti Penyedia
Barang/Jasa adalah :

badan usaha atau orang
perseorangan yang
menyediakan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya.



Penyedia

3. Organisasi Pengadaan:



Proses Penyusunan RUP

**Perpres 54 tahun 2010
beserta perubahannya**

22 - 25
Pasal



Proses Penyusunan RUP

4 Penyusunan KAK

Lampiran : 2 – 13

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Swakelola

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : (Pengadaan pekerjaan swakelola)

1. LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan pekerjaan swakelola

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola
- b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola

3. TARGET/SASARAN

: Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan swakelola

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

- : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan swakelola
- K/L/D/I
 - Satker/SKPD
 - PPK

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk merencanakan pekerjaan swakelola
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan
- b. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan
- c. Fasilitas penunjang yang disediakan

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(apabila diperlukan)

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola hari/bulan, terhitung sejak termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

8. TENAGA KERJA DAN/ ATAU TENAGA AHLI PERSEORANGAN

Tenaga kerja upah borongan dan/ atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

9. BAHAN/MATERIAL DAN PERALATAN

Bahan/material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

10. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola :

11. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :
- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
 - Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - Ketentuan gambar kerja (apabila diperlukan);;
 - Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan;
 - Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
 - Dll yang diperlukan

PA/KPA 201....

Proses Penyusunan RUP

**Perpres 54 tahun 2010
beserta perubahannya**

22 - 25
Pasal



5 Pengumuman
RUP

Detail Paket Pengadaan

Paket ABC
(7302907)

Penyedia

KLDI : L36
Satuan Kerja : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Tahun Anggaran : 2017
Program : Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kegiatan : Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jenis Pengadaan :
Volume : 1 Paket
Lokasi :
Detail Lokasi : Jatinegara jl. bekasi timur 2 no 38
Deskripsi : Beli Komputer
Spesifikasi : Ram 2 GB

SUMBER DANA

Sumber Dana (1) : APBN
Sumber APBN (1) :
Pagu (1) : 10000000
MAK (1) : 111.11.1111111.11.11.11.1111.111.111.1111111

Sumber Dana (2) : APBN
Sumber APBN (2) :
Pagu (2) : 1200000

PEMILIHAN PENYEDIA

Awal : Januari
Akhir : Februari

WAKTU PEKERJAAN

Awal : Maret
Akhir : April
Sebelum Kaji Ulang : Paket ABC

Tutup

detail paket
terumumkan /
output

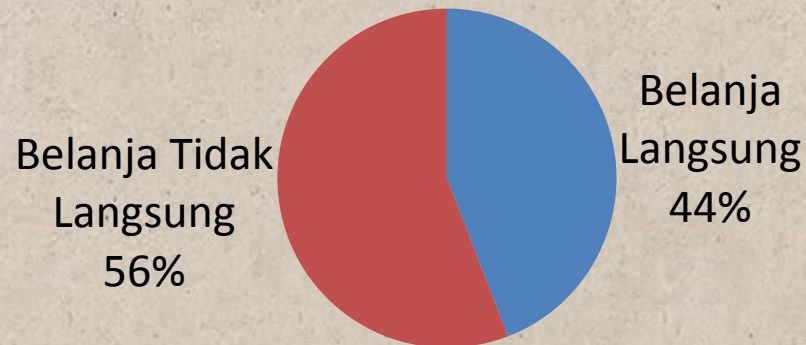
 Kembali

**PROFIL SIRUP
PROVINSI BANGKA
BELITUNG
TAHUN ANGGARAN
2017**

ALOKASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI BANGKA BELITUNG T.A. 2017

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
1	Belanja Langsung	1.176,60 M	44%
2	Belanja Tidak Langsung	1.489,52 M	56%
Total Anggaran		2.666.123.454.944,11	

Alokasi Belanja Provinsi Bangka Belitung



Pengumuman RUP

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
1	Belanja Langsung	1.176,60 M	100%
2	Pengumuman SiRUP	1.221,37 M	104%

Rencana Paket Pengadaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar		Penyedia + swakelola			
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
BARANG	580	34,07	106	83,17	4	20,46	1	74,51	0	0,00	-	-	691	212,21
KONSTRUKSI	148	17,60	20	19,05	35	226,37	0	0,00	0	0,00	-	-	203	263,02
KONSULTANSI	58	3,90	23	12,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	81	16,86
JASA LAINNYA	113	7,72	17	12,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	130	20,36
Jumlah	899	63,29	166	127,82	39	246,83	1	74,51	0	0,00	1.879	708,92	2.984	1.221,37

Data pagu ditampilkan dalam satuan milyar rupiah *) *Data diperbaharui otomatis, Setiap Jam 00:00*

Data valid per Tanggal 30-10-2017 Pukul 09:26

SiRUP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

[Rekap](#) [Cari Paket](#) [Unduh](#) [Berita](#) Masuk

REKAPITULASI RUP TAHUN ANGGARAN 2017

Perspektif Kegiatan
Perspektif Anggaran

Tampilkan entri Cari:


No	KIL/D/I	Penyedia		Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
1	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	953	497.638	1879	714.101	2.832	1.211.739
TOTAL		953	497.638	1.879	714.101	2.832	1.211.739





Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pertama Sebelumnya 1 Selanjutnya Terakhir

Catatan:

- Data rekap akan diperbaharui setiap 3 jam sekali
- Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah



PROFIL RUP PROVINSI BANGKA BELITUNG

Gambar 2

No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola →		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	5	774	62	17.238	67	18.012
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	2	17	39	4.552	41	4.570
3	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	35	2.689	54	20.225	89	22.915
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	3	164	40	20.707	43	20.871
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	23	2.184	32	6.211	55	8.395
6	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	15	3.138	33	6.165	48	9.304
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	15	2.626	41	11.712	56	14.338
8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	12	4.182	34	4.999	46	9.181
9	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	1	878	47	5.695	48	6.573
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	10	1.177	48	14.506	58	15.683
11	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	12	1.270	49	8.122	61	9.392
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	39	6.381	40	9.161	79	15.543
13	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	62	2.908	34	32.086	96	34.994
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	30	3.220	35	6.490	65	9.710
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	0	0	38	8.143	38	8.143
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	19	647	37	4.827	56	5.475
17	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	16	1.434	68	3.707	84	5.142

PROFIL RUP PROVINSI BANGKA BELITUNG

Gambar 3

18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	178	225.266	98	50.912	276	276.178
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANGKA BELITUNG PA/KPA	3	40	46	6.203	49	6.244
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	7	183	38	11.579	45	11.762
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	1	11	22	2.974	23	2.985
22	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	70	23.365	243	216.171	313	239.536
23	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	26	20.516	30	4.470	56	24.986
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	17	2.986	46	7.201	63	10.188
25	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	59	39.359	73	13.092	132	52.451
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	32	8.015	26	2.123	58	10.139
27	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	23	1.970	47	9.257	70	11.227
28	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	4	419	45	9.423	49	9.843
29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	6	611	34	7.185	40	7.796
30	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	42	20.601	46	8.984	88	29.586
31	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	60	94.835	102	17.327	162	112.163
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	9	2.201	47	9.813	56	12.014
33	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	58	14.009	124	72.707	182	86.717
34	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PA/KPA	61	9.897	81	79.808	142	89.706
TOTAL		955	497.987	1.879	713.791	2.834	1.211.778

TERIMA KASIH

